



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YUSTINUS. J
2. Jabatan : ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
3. NHK : 786281

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 951.650.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 800 m2/89 m2 di KAB / KOTA SINTANG, WARISAN Rp. 230.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 189 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/104 m2 di KAB / KOTA SINTANG, LAINNYA Rp. 145.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 719 m2/104 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 251.650.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 317.550.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO YAMAHA 2015 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.350.000
2. MOTOR, BEAT HONDA 2013 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.200.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA/MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 304.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 82.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 133.547.292**F. HARTA LAINNYA** Rp. 15.989.000**Sub Total** Rp. 1.500.736.292**III. HUTANG** Rp. 140.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.360.736.292



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.